KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tak ada PP bisa ubah UU
Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Tak Ada PP Bisa Ubah UU

Perbaikan Salah Ketik Draf RUU Ciptaker

JAKARTA-Pimpinan DPR memberikan waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki adanya salah ketik dalam draf dan naskah akademik (NA) Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, draf tersebut masih dalam proses registrasi di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

"Dalam draf itu kan ada kesalahan ketikan, oleh karena itu, nanti kita kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kita bahas lebih lanjut. Kan nanti ada rapat antara pemerintah dengan DPR, pada saat itulah kita kasih kesempatan pemerintah untuk me-*review* draf tersebut," ujarnya kepada INDOPOS di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/2).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, DPR pun baru beberapa hari lalu menerima draf dan NA RUU Cipta Kerja dari pemerintah dan baru akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk segera diproses pembahasannya.

"Kemudian kita putuskan apakah di komisi pansus atau di baleg, nah itu kan harapannya tadinya kan akan diteliti di situ. Itu belum sampai diteliti di situ kemudian sudah terjadi kesalahan yang kemudian diakui kesalahan ketikan," terangnya.

Sebab itu, Dasco meminta semua pihak untuk bersama-sama mengamati proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini agar substansi atau pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam RUU ini bisa terawasi.

"Supaya kemudian hal-hal yang sekiranya menimbulkan kontroversial dan sangat subtansif itu nanti ada pelanggaran supaya tidak terjadi demikian," jelas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKO

AKSI PENOLAKAN - Aktivis buruh melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Yogyakarta, Rabu (12/2/2020). Mereka menolak adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai hanya berpihak pada pengusaha.

Soal berkurangnya kewenangan kepala daerah karena peraturan daerah (perda) bisa dihapus dengan PP, Dasco menuturkan, hal itu nantinya akan dibahas antara DPR dengan pemerintah dan dimasukkan ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ciptaker untuk dicarikan solusi dan juga disinkronisasi.

Dasco menilai, wajar jika banyak kesalahan karena RUU Cipta Kerja ini sangat amat tebal dan pemerintah juga dikejar tenggat waktu pembahasan yang sempit. "Dan ini yang ngerjain kan masih manusia, bukan mesin jadi *human error* itu masih bisa saja terjadi. Dan itu kan baru draf yang kemudian masih sangat bisa diperbaiki," imbuhnya.

"Kita mungkin akan rapim minggu ini, tapi kemudian untuk jadwal dengan pemerintah itu setelah kita Bamuskan setelah rapim," tambah Dasco.

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku, adanya salah ketik dalam perumusan Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana kesalahan ketik tersebut yakni peraturan pemerintah (PP) dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang (UU).

"Ya, salah ketik sebenarnya. Artinya seharusnya keliru, kan tadi udah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu per-UU. Bahwa yang bisa mengubah UU itu hanya UU. Kalau PP itu hanya bisa mengatur lebih lanjut, itu prinsipnya," terangnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

Dia mengatakan, adanya kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki. Hal ini mengingat Omnibus Law tersebut masih berbentuk draf. "RUU Cipta Kerja itu sekarang masih dalam bentuk rancangan. Dimana semua perbaikan, baik karena salah maupun karena perbedaan pendapat, itu masih bisa diperbaiki selama proses di DPR. Itu aja. Jadi, tidak ada PP itu bisa mengubah UU," tuturnya.

Mahfud menyebut, rakyat diberikan kesempatan untuk memantau pembahasan dan mempersilakan agar pembahasan dilakukan secara terbuka.

"DPR bisa mengubahnya, rakyat bisa mengubahnya, mengusulkannya. Namanya RUU Demokratis itu masih bisa diperbaiki selama masa pembahasan dan sekarang sudah dimulai proses penilaian masyarakat. Silakan aja dibuka," tuntasnya. **(aen/wok)**